



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI KAMIS, 26 FEBRUARI 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI

BHS Soroti Aspal Perlintasan KA Sebidang Tak Rata

TANGGULANGIN-Keselamatan di perlintasan sebidang kereta api tak hanya soal pelatung pintu yang tertutup, tetapi juga kondisi aspal yang

rata dan aman dilalui. Jika permukaan jalan berlubang atau tidak sejajar dengan rel, risikonya bukan sekadar kemacetan, melainkan kecelakaan fatal.

Hal itu ditegaskan Ketua Kelompok Fraksi (Kapaksi) Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), saat meninjau Perlintasan Sebidang KA di Jalan Raya Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Rabu (25/2).

● Ke Halaman 10



TEGAS: BHS (tengah) saat berkoordinasi untuk memastikan aspal di perlintasan sebidang, Tanggulangin, Sidoarjo, Rabu (25/2).

Komisi XIII DPR RI Tinjau Langsung Pelayanan Kunjungan dan Pembinaan di Lapas

Atap Ruang Kelas SMPN 1 Gedangan Ambruk

Sidoarjo, Bhirawa

Karena faktor usia bangunan yang sudah tua, atap ruang kelas di SMPN 1 Gedangan ambruk. Bupati Sidoarjo Subandi mengintruksikan perbaikan harus segera dilakukan untuk menjamin keselamatan siswa.

"Kita menargetkan agar pengerjaan bisa langsung tancap gas. Harapannya, setelah libur Lebaran, siswa sudah bisa kembali belajar dengan tenang," komentar Bupati Sidoarjo Subandi, Selasa (24/2) kemarin, yang melakukan Sidak ke lokasi sekolah tersebut.

Subandi yang datang didampingi wakil ketua DPRD Warid Andono, Kadikbud Tirta Adi, Camat Gedangan Asmara Hadi dan Kades Punggul, menyaksikan kondisi saat ruang kelas yang atapnya telah jebol, sementara tiga ruang kelas lainnya

dalam kondisi lapuk dan rawan ambruk. Tidak hanya masalah atap, lantai ruang kelas juga kerap tergenang banjir saat hujan deras mengguyur.

Karena kondisi yang memprihatinkan, Pemkab Sidoarjo menurut Subandi akan mempercepat proses perbaikan ruang kelas tersebut, melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT). Agar proses perbaikan tidak perlu menunggu penganggaran reguler yang memakan waktu lama. "Perbaikan harus segera dilakukan demi menjamin keselamatan siswa," katanya kembali.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warid Andono, ikut menambahkan kerusakan mendasak yang harus ditangani adalah pembangunan kembali atap yang ambruk serta penggantian konstruksi kayu yang sudah keropos dengan material yang lebih kokoh.

Kepala Dikbud Sidoarjo Tirta Adi, dalam kesempatan itu memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk renovasi ruang kelas tersebut adalah sekitar Rp 250 juta

per ruang kelas. "Namun, angka final masih menunggu kajian teknis, termasuk opsi penggunaan rangka baja ringan agar lebih awet," komentarnya. (kus.wwn)



Ruang kelas di SMPN 1 Gedangan yang berada di desa Punggul Kecamatan Gedangan ambruk. Sidak oleh Bupati, Wakil Ketua DPRD, Kadikbud, Camat Gedangan dan Kades Punggul.

Jalan Rusak Sukodono-Ponokawan Diperbaiki Pakai Overlay tapi Tak Penuh

Setelah lama dikeluhkan karena berlubang dan kerap tergenang, ruas jalan Sukodono-Ponokawan akhirnya diperbaiki. Namun, perbaikan dilakukan dengan metode overlay tidak penuh lantaran keterbatasan anggaran Dinas PU.

SAAT sidak, Selasa (24/2), Bupati Sidoarjo Subandi mendapati proses perbaikan tengah berlangsung. Sejumlah pekerja tampak memadamkan aspal yang rusak.

"Kita hari ini menargetkan dan sudah wilayah Sukodono ya. Ini memang sudah lama. Kalau ke Kras, kurang lebih empat sampai lima kilometer perbaikan," ujar Subandi di lokasi.

Sebelumnya, secara ideal perbaikan dilakukan dengan metode overlay penuh atau aspal hot mix. Namun, kondisi anggaran membuat pemerintah harus menggunakan metode overlay tidak penuh.



FENOMENA

BUPATI SIDAARJO: Bupati Sidoarjo Subandi (tengah) saat sidak jalan rusak di rute Sukodono-Ponokawan.



Wabup Sidoarjo Sidak Harga Sembako dan Serap Aspirasi Pedagang di Pasar Porong

Sidoarjo, Pojok Kiri-

Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga kebutuhan pokok di Pasar Porong, Selasa (24/2/2026), di sela kegiatan penyaluran bantuan kursi roda bagi masyarakat Kecamatan Porong. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan stabilitas harga sembako serta memantau secara langsung kondisi pasar pada hari keempat bulan Ramadan.

Dalam sidak tersebut, Wabup Mimik berinteraksi langsung dengan para pedagang untuk mengetahui perkembangan harga kebutuhan pokok di tingkat pasar. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, harga sembako terpantau relatif stabil dan belum mengalami kenaikan signifikan meskipun terjadi peningkatan permintaan selama Ramadan.

"Alhamdulillah, sampai hari ini harga kebutuhan pokok masih stabil. Memang ada kenaikan dan penurunan kecil, tetapi masih dalam batas wajar. Insya Allah ketersediaan sembako juga cukup hingga Lebaran nanti," ujar Wabup Mimik.

Selain memantau harga, Wabup Mimik juga menyerap aspirasi dari pedagang dan pengunjung pasar terkait kondisi sarana dan prasarana. Sejumlah pengunjung mengeluhkan kondisi jalan di area pasar yang mulai bergelombang dan dinilai dapat mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengunjung saat beraktivitas.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan segera berkoordinasi dengan pengelola pasar dan paguyuban pedagang guna mencari solusi terbaik dalam meningkatkan kualitas fasilitas pasar.

"Kondisi Pasar Porong ini perlu perhatian bersama. Kami melihat masih banyak lapak yang kosong dan aktivitas pasar belum begitu ramai. Pemerintah harus hadir untuk mencari solusi agar pasar kembali hidup dan diminati masyarakat," tegasnya.

Wabup Mimik juga menyortir keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di luar area pasar yang dinilai turut memengaruhi aktivitas perdagangan di dalam pasar. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan mengkaji penataan kembali agar aktivitas jual beli dapat berjalan lebih tertata dan merata.

Melalui kegiatan sidak ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, katanya. (Khol/ Dy)

Bupati: Perbaikan Cepat Lewat Skema BTT

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo, Subandi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 1 Gedangan, Selasa (24/2/26), menyusul laporan ambruknya atap salah satu ruang kelas.

Dalam sidak tersebut, Subandi menegaskan perbaikan harus segera dilakukan demi menjamin keselamatan siswa dan kelancaran proses belajar-mengajar.

Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Satu ruang kelas terlihat dengan atap jebol, sementara tiga ruang kelas lainnya mengalami pelapukan cukup parah dan dinilai rawan ambruk. Selain itu, lantai kelas kerap tergenang banjir saat hujan deras, sehingga berpotensi mengganggu aktivitas belajar dan membahayakan siswa maupun guru.

"Ini tidak bisa ditunda. Anak-anak membutuhkan sekolah yang aman dan layak. Itu tanggung jawab pemerintah daerah," tegas Subandi.

Selasa sore, Sidak tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, perwakilan Dinas Pendidikan, Camat setempat, serta kepala desa.

Untuk mempercepat penanganan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan memastikan perbaikan dilakukan melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT). Skema ini dipilih agar proses pengerjaan tidak menunggu perubahan anggaran reguler yang biasanya memerlukan waktu lebih panjang.

Subandi menjelaskan, pekerjaan mendasak meliputi pembangunan ulang atap yang ambruk serta penggantian konstruksi kayu yang telah keropos dengan material yang lebih kuat dan tahan lama. "Apalagi harus dibangun ulang, dan lanjutnya kita tinggalkan sekalian karena sering banjir. Jadi tidak kerja dua kali," ujarnya.

Berdasarkan estimasi awal, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp250 juta per ruang kelas. Namun angka tersebut masih akan difinalisasi setelah kajian teknis rampung, termasuk mempertimbangkan penggunaan rangka baja ringan agar bangunan lebih kokoh dan aman.

Pemkab menargetkan kajian teknis segera selesai agar proses perbaikan bisa langsung dilakukan.



Bupati Sidoarjo Subandi sidak SMPN 1 Gedangan yang ambruk.

ringan agar bangunan lebih kokoh dan aman. Pemkab menargetkan kajian teknis segera selesai agar proses perbaikan bisa langsung dilakukan.

Wabup Mimik Idayana Serahkan Kursi Roda Warga Keterbatasan Fisik di Porong

SIDOARJO - Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana bersama Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyerahkan bantuan kursi roda kepada warga penerima manfaat di Kecamatan Porong, Selasa sore (24/2/26).

Bantuan diberikan kepada Ribowo dan Manis, warga Desa Pamotan, serta Seger, warga Desa Candi, Kecamatan Porong. Penyaluran tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan dukungan alat bantu mobilitas bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan, Wakil Bupati Sidoarjo menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang mengalami keterbatasan fisik dan kesulitan ekonomi.

"Ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kesulitan mendapatkan alat bantu kursi



Wabup Mimik Idayana menyerahkan bantuan kursi roda kepada warga di Kecamatan Porong, Selasa sore (24/2/26).

roda," ujar Mimik Idayana. Ia menegaskan, bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian serta membebaskan aktivitas sehari-hari para penerima manfaat.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Sosial juga akan terus melakukan pendataan dan pemantauan agar bantuan sosial tepat sasaran "bagi" warga.

Salah satu penerima manfaat, Manis, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Ia mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan kursi roda tersebut.

"Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Hj. Mimik Idayana atas bantuan kursi roda ini. Semoga dapat membantu aktivitas saya sehari-hari," ungkapnya baru.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat terus terjalin guna mewujudkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. ● Lee



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Satu Tahun Kepemimpinan Bupati Subandi-Wakil Bupati Mimik Idayana

PERKUAT PEMBANGUNAN, CATATKAN BANYAK KEMAJUAN

Pemkab Sidoarjo menunjukkan komitmen kuat menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Di era kepemimpinan Bupati Sidoarjo Subandi-Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, sejumlah keberhasilan dicapai.



SOROTAN UTAMA:
Revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo mencerminkan komitmen pemerintah daerah menghadirkan ruang publik yang humanis dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

SUBANDI menyampaikan bahwa salah satu capaian yang menjadi sorotan utama yakni revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo. "Revitalisasi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah menghadirkan ruang publik yang humanis dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat," ujar Subandi.

Disektor pendidikan, Pemkab Sidoarjo memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui Program Beasiswa Kabupaten Sidoarjo yang merupakan bagian dari 14 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Sepanjang 2025, sebanyak 2.010 penerima

manfaat memperoleh beasiswa pendidikan tinggi dan keagamaan. Pada 2026, jangkauan program diperluas melalui Beasiswa Pendidikan Tinggi dan Beasiswa Yatim untuk jenjang SD, SMP, dan SMA negeri maupun swasta dengan total kuota 4.000 penerima manfaat.

Di bidang infrastruktur, Pemkab Sidoarjo mencatat kemajuan signifikan melalui program betonisasi jalan. Hingga akhir 2025, sebanyak 13 ruas jalan sepanjang 12,67 kilometer telah dibetonisasi, disertai rehabilitasi dua jembatan.

Pada 2026, perbaikan infrastruktur diperkuat melalui Program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan

(PIWK) yang menysasar percepatan perbaikan jalan dan infrastruktur skala kecil di 18 kecamatan. Peningkatan banjir juga terus dilakukan melalui normalisasi 10 sungai, optimalisasi drainase, dan percepatan pembangunan rumah pompa di titik rawan genangan.

Di sektor sosial, kolaborasi Pemkab Sidoarjo dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berhasil merehabilitasi 450 unit rumah tidak layak huni di 18 kecamatan. Pemerintah daerah juga menangani kondisi darurat dengan membangun kembali 33 rumah pasca atap ambruk dan

17 rumah pasca kebakaran. Pada sektor kesehatan, sepanjang 2025 dibangun 1.004 jamban sehat sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan pencegahan stunting. Atas capaian tersebut, Kabupaten Sidoarjo meraih Penghargaan STBM Kategori Madya Tingkat Nasional.

Komitmen penurunan *stunting* juga diwujudkan melalui kenaikan 100 persen insentif kader posyandu dan pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hingga akhir 2025, Sidoarjo mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) dengan tingkat keaktifan peserta JKN sebesar 80,87 persen atau sekitar 1,7 juta jiwa, serta kembali meraih UHC Award Kategori Madya pada awal 2026.

Sementara pada sektor pelayanan publik, Pemkab Sidoarjo meraih Opini Kualitas Tertinggi dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 2025 oleh Ombudsman Republik Indonesia, sekaligus menempatkan Kabupaten Sidoarjo dalam Top 7 Nasional kategori pemerintah kabupaten.

"Ke depan, Pemkab Sidoarjo berkomitmen melanjutkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata demi kesejahteraan masyarakat serta masa depan Sidoarjo yang semakin tangguh," pungkash Bupati Subandi.

Investasi Sidoarjo Tembus Rp 18,8 T

Realisasi investasi di Sidoarjo sepanjang 2025 mencapai Rp 18,887 triliun. Angka tersebut tumbuh 10,80 persen dibandingkan tahun 2024 yang hanya Rp 17,046 triliun. Capaian itu sekaligus melampaui target investasi sebesar Rp 12,12 hingga Rp 18 triliun.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan bahwa pertumbuhan investasi menjadi salah satu indikator kuatnya kepercayaan dunia usaha terhadap Kota Delta. Menurutnya, stabilitas daerah dan kemudahan pelayanan perizinan merupakan faktor penting dalam menarik minat investor. (ful/xav)

Realisasi Investasi di Sidoarjo

2024
Rp 17,046 triliun
2025
Rp 18,887 triliun

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Rp 15,065 triliun

Penanaman Modal Asing (PMA)

Rp 3,822 triliun

Industri Penyumbang Investasi Terbesar

Industri kimia dan farmasi
Rp 2,993 triliun

Industri logam

Rp 2,768 triliun

Industri kertas

Rp 2,364 triliun

Transportasi, perdagangan,

dan telekomunikasi

Rp 2,084 triliun

Industri makanan

Rp 1,843 triliun

Negara Penyumbang PMA Terbesar

Hongkong

Rp 2,229 triliun

Tiongkok

Rp 625 miliar

Singapura

Rp 404 miliar

Jepang

Rp 161 miliar

Belanda

Rp 85 miliar



Subandi | Bupati Sidoarjo



Mimik Idayana | Wakil Bupati Sidoarjo

Jawa Pos

Pemkab Sidoarjo Bakal Perbaiki 400 Warung Rakyat

Bantuan Naik Dua Kali Lipat, Sasar Sembilan Kecamatan

SRI Utami tak lagi kebingungan saat musim hujan. Warungnya yang berada di Jalan Gajah Mada kini lebih tertata dan kokoh. Berkat polekan dana bantuan pemerintah, pengunjung warung Sri juga bertambah.

"Dulu sudah rusak. Bahkan hampir roboh," kata Sri yang kesehariannya berjualan sayuran. Tanpa bantuan, lanjut perempuan berusia 60 tahun tersebut, perbaikan sulit dilakukan. Sebab penghasilannya sebagai penjual sayur hanya pas-pasan.

Program Renovasi Warung Rakyat dirancang berkelanjutan dengan target total 2.000 titik selama lima tahun. Sepanjang 2025, tercatat ada 800 warung yang direhab. Lokasinya tersebar di 18 kecamatan. Adapun lima wilayah dengan capaian tertinggi yakni Buduran 66 unit, Waru 63 unit, Kota 62 unit serta Taman dan Krian masing-masing 61 unit. Selain menambah target, Pemkab juga mengandakan nilai bantuan menjadi Rp 10 juta per unit. Naik dibanding tahun sebelumnya Rp 5 juta. "Warung rakyat harus berdaya saing. Sehingga, anggaran dinaikkan agar renovasi maksimal," kata Bupati Sidoarjo Subandi. Menurut dia, program bu-



Warung rakyat harus berdaya saing. Sehingga, anggaran dinaikkan agar renovasi maksimal."

Subandi
Bupati Sidoarjo

kan sekadar perbaikan fisik bangunan. Namun juga pemberdayaan masyarakat agar bisa lebih berkembang. "Agar tepat sasaran, kami sudah meminta pengawasan bantuan diperketat agar tepat sasaran," tambah Subandi.

Program difokuskan di sembilan kecamatan tahun ini. Yakni Waru, Sedati, Gedangan, Buduran, Sidoarjo, Candi, Tanggulangin, Porong dan Jabon. Renovasi direncanakan mulai dilaksanakan pada triwulan III 2026. Pelaksanaan dimulai dari sosialisasi serta inventarisasi dan verifikasi administrasi pada bulan ini. Tahapan dilanjutkan dengan pengusul-an pada Maret hingga April serta penetapan penerima Mei hingga Juni 2026.

Kontribusi pelaku UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sidoarjo telah mencapai 50,02 persen. Agar ekonomi kerakyatan terus tumbuh, Pemkab memperkuat Program Renovasi Warung Rakyat. Sebanyak 400 warung direncanakan bakal direhab tahun ini.



LEBIH CERAH: Sri Utami menata barang jualan di warungnya yang terletak di Jalan Gajah Mada. Warga Magersari itu merupakan salah satu penerima bantuan untuk perbaikan warung rakyat.



Pemkab sudah menetapkan kriteria penerima bantuan berdasarkan penilaian administrasi. Selain ber-KTP Sidoarjo, warungnya harus di lahan sendiri. Ukuran wa-



Harapannya bantuan rehab RTLH ini benar-benar memberi dampak positif bagi pemiliknya."

Mimik Idayana
Wakil Bupati Sidoarjo

Renovasi Rumah Tak Layak Rp 30 Juta Per Unit

SELAIN warung, Pemkab juga fokus memperbaiki rumah tak layak huni (RTLH). Ada 204 hunian yang diperbaiki setahun terakhir. Untuk tahun ini, targetnya dinaikkan menjadi 589 RTLH. Tahun lalu tiap rumah diberikan anggaran sekitar 30 juta untuk perbaikan yang berasal dari APBD Sidoarjo. Besarannya bantuan dipastikan tidak berubah. Pemerintah daerah tetap mengalokasikan 30 juta per unit rumah. Sehingga total anggaran RTLH pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp 17,67 miliar.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengatakan Selain dari APBD, Pemkab Sidoarjo pada 2026 juga memperoleh bantuan rehab RTLH dari pemerintah pusat. Namun, jumlah pasti bantuan tersebut masih menunggu kepastian. Bantuan

rencananya disebarkan merata di seluruh kecamatan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi lapangan.

"Harapannya bantuan rehab RTLH ini benar-benar memberi dampak positif bagi pemiliknya," katanya. Mimik meminta pemerintah dari tingkat RT, RW hingga desa dan kecamatan bisa mendata mana warga yang membuntukan RTLH. Menurutnya hal tersebut menjadi kunci ketepatan sasaran. "Kami ingin bisa menjangkau mana yang benar-benar butuh," ujarnya.

Mimik menegaskan jika setiap rumah yang diajukan wajib memenuhi kriteria program serta dilengkapi dokumentasi kondisi bangunan dan alamat yang jelas. Data yang akurat akan mempercepat proses rehab RTLH. (eza/hen)

Jawa Pos

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Pasar Murah Ramadan 1447 H Digelar di 10 Kecamatan, Pemkab Sidoarjo Tekan Harga Sembako dan Dongkrak UMKM

Media Sorot Mata 25 Februari 2026



SIDOARJO, MEDIASOROTMATA.COM – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menggelar Pameran Produk Unggulan Daerah bertajuk Pasar Murah Ramadan 1447 H yang dilaksanakan di 10 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo mulai 25 Februari hingga 12 Maret 2026.

Program pasar murah tersebut menghadirkan penjualan bahan pokok dengan harga terjangkau serta bazar produk UMKM, dan turut dimeraikan dengan Lomba Masak PKK se-Kabupaten Sidoarjo.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo, dr. Hj. Sriatun Subandi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok selama bulan Ramadan.

Ia menuturkan bahwa pihaknya ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum untuk mendorong produk-produk unggulan UMKM agar semakin dikenal dan diminati.

Ia juga menambahkan bahwa melalui Lomba Masak PKK, pihaknya ingin mendorong kreativitas kader PKK dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi menu sehat dan bergizi bagi keluarga.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa PKK memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan keluarga dan melalui kegiatan tersebut diharapkan semangat kebersamaan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat semakin kuat.

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 25 Februari 2026 di Kecamatan Buduran (15.00 - 17.30 WIB)
- 26 Februari 2026 di Kecamatan Sidoarjo (15.00 - 17.30 WIB)
- 2 Maret 2026 di Kecamatan Jabon (15.00 - 17.30 WIB)
- 3 Maret 2026 di Kecamatan Krembung (15.00 - 17.30 WIB)
- 4 Maret 2026 di Kecamatan Prambon (15.00 - 17.30 WIB)
- 5 Maret 2026 di Kecamatan Tarik (15.00 - 17.30 WIB)
- 9 Maret 2026 di Kecamatan Krian (15.00 - 17.30 WIB)
- 10 Maret 2026 di Kecamatan Gedangan (15.00 - 17.30 WIB)
- 11 Maret 2026 di Kecamatan Sedati (15.00 - 17.30 WIB)
- 12 Maret 2026 di Kecamatan Waru (15.00 - 17.30 WIB)

dr. Hj. Sriatun Subandi berharap kegiatan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat peran UMKM dan kader PKK dalam pembangunan ekonomi berbasis keluarga selama Ramadan. *(NUR)*





Pedalindo mencatat 3.700 data pedagang, terdiri dari sekitar 3.000 pedagang tidak tetap dan 700 pedagang tetap. Namun yang aktif berjualan sekitar 400 pedagang tetap selebihnya adalah pedagang sementara yang menempati lapak pedagang tetap yang izin tidak jualan.

Saat dipindah ke Alun-alun kami mengajukan 505 pedagang namun ada yg tidak kebagian tempat
Selama ramadan ada kebijakan pindah ke MPP, kapasitas di MPP hanya mampu menampung 320 stan. Pada hari pertama, 430 pedagang datang, namun tidak semuanya bisa tertampung. Selain tempat tidak memadai, Bram juga menyebut sepiunya pengunjung, hanya satu hingga dua pedagang yang benar-benar laku di hari pertama.

Pedalindo menegaskan tidak menolak relokasi, tetapi meminta dukungan promosi serta kepastian lokasi pasca-Lebaran. Mereka juga berharap selama sisa Ramadan yang tinggal sekitar tiga minggu, pedagang dapat kembali berjualan di Ponti.

Ketua DPD Pedalindo Sidoarjo, Sunyoto Gatot, menyampaikan empat tuntutan, yakni menolak relokasi ke MPP, meminta pengembalian ke Ponti, mendesak penerbitan Perbup UMKM sebagai payung hukum, serta pembentukan tim terpadu untuk menghentikan tarik-menarik kepentingan.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto menilai persoalan ini seharusnya sudah matang sebelum Ramadan.

"Pelaku usaha jangan dibuat mandor-mandir seperti ini. Harus ada perlindungan dan regulasi yang jelas," tegasnya.

Anggota Komisi B Emir Firdaus menambahkan, UMKM perlu pembinaan, pelatihan, hingga akses pinjaman berbunga rendah sekitar 3 persen. Ia juga mengusulkan konsep festival UMKM di GOR sebagai alternatif lokasi yang lebih representatif tanpa mengganggu konsep CFD di Alun-alun.

Humas Pedalindo Ismuka Ackmadi menambahkan bahwa pedagang Ukm tetap sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ada, Pki Pedalindo dikembalikan ke Jl.Ponti. Kami sampaikan rasa terimakasih kepada Ketua DPRD dan Jajarannya serta komisi B telah mensupport supaya Pedalindo kembali berjualan ke Jl. Ponti, dan saya tegaskan bahwa tidak ada tarikan pungli buat institusi polisi, pungkasnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Hearing DPRD Sidoarjo, Pedalindo Keberatan Atas Relokasi CFD



Sidoarjo, Arjunanusanteranews.com, – Hearing DPRD Sidoarjo, Pedalindo berharap aktivitas dikembalikan semula. Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (PEDALINDO) adalah suatu Paguyuban yang menaungi dan memberdayakan pedagang UMKM, khususnya yang beroperasi di area Car Free Day (CFD) di area alun-alun Sidoarjo dan sebelumnya bertempat di Jl. Raya Ponti, kini telah direlokasi di area Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Lingkar Timur.

Keluarga besar Pedalindo Sidoarjo merasa keberatan beroperasi di MPP saat ini. Mengingat bulan Ramadhan adalah ramai-ramainya pembeli, namun di MPP kondisinya sangat sepi. Dengan pertimbangan menjelang Hari Raya Idul Fitri semakin dekat dan berjualan tidak mendapatkan hasil yang maksimal, maka Pedalindo meminta kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk **hearing** memberikan solusi yang terbaik, pada Rabu (25/2/2025).

Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD kabupaten Sidoarjo H. Abdullah Nasih, S.M., Beserta Jajarannya, dan Anggota Komisi B dan C, serta OPD terkait.

ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih menyampaikan bahwa Ukm – Ukm yang ada di Sidoarjo ini dimana ada keluhan aktivitasnya di pindah ke MPP, saya pikir persoalannya adalah bagaimana pemerintah harus hadir dalam setiap ruang kebutuhan masyarakat, khususnya UKM dalam hal ini. Sehingga kami mendesak kepada teman-teman di Pemkab bahwa perlindungan, pengujian, penyiapan segala macam sarana prasarana itu harus betul-betul kepada teman-teman UKM.

Dikatanya bahwa UKM ini menjadi penyangga perekonomian yang ada di daerah ini, dan tidak main-main kita bisa tumbuh seperti ini. Jadi juga Ukm-Ukm semangatnya bisa kita ambil yang luar biasa. Harapan kami adalah kita bikin nanti Minggu depan pelaksanaan dari jualan atau pembeli di UKM ini dikembalikan setidaknya ada dua opsi, bisa kembali di Car Free Day di kawasan Alun-alun atau di kawasan Ponti.

"Karena terus terang kalau kita melihat masalah waktu di bulan Ramadhan ini biar kawan-kawan bisa menerima keberkahan juga".



Kami Meminta pemerintah tidak sampai "membunuh rezeki" para pedagang usai relokasi dari kawasan CFD Alun-alun ke Mall Pelayanan Publik (MPP) selama Ramadan 2025.

Menurutnya, Ramadan memiliki magnet ekonomi yang besar, terutama bagi pelaku UMKM dan pedagang kaki lima yang mengandalkan momen berburu takjil dan buka puasa.

"Ramadan punya magnet luar biasa. Jangan sampai kita membunuh rezeki orang lain. UMKM adalah mitra pemerintah dan tulang punggung ekonomi daerah," ujarnya saat memimpin forum audiensi bersama Perkumpulan Pedagang Kaki Lima Indonesia (Pedalindo).

Hearing DPRD Sidoarjo, Pedalindo berharap aktivitas dikembalikan semula. Founder sekaligus Ketua Umum Pedalindo, Junius Bram, mengatakan pihaknya menyampaikan aspirasi para pedagang yang terdampak relokasi. Ia menyebut, selama 11 tahun pedagang menempati Jalan Raya Ponti dan merasa mendapat dukungan dari Pemkab Sidoarjo.

Pada 23 Januari 2026 digelar rapat, dan kurang dari dua minggu kemudian pedagang dipindah dari Ponti ke Alun-alun. Per 1 Februari 2026, relokasi resmi dilakukan dengan total enam kelompok pedagang, di mana Pedalindo menjadi kelompok terbanyak.

Meski sempat euforia menempati Alun-alun, Bram mengakui pendapatan pedagang lebih tinggi saat berjualan di Ponti.

"Di Alun-alun yang ramai hanya makanan dan minuman. Pedagang pakaian turun drastis karena jam operasional terbatas," katanya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Lakhsmie Herawati Yuantina, menyampaikan bahwa penambahan Pustu Kalijaten merupakan bagian dari penguatan program Integrasi Layanan Primer (ILP). Program tersebut bertujuan mengintegrasikan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, balita, remaja, dewasa hingga lansia.

“Pelayanan di Pustu Kalijaten difokuskan pada kesehatan ibu dan anak serta layanan bagi orang dewasa dan lansia. Untuk sementara, alat kesehatan masih memanfaatkan fasilitas milik Puskesmas Taman dan akan dilengkapi secara bertahap tahun ini,” jelasnya.

Meski demikian, DPRD memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap proses pemenuhan sarana dan prasarana tersebut. Komisi C DPRD menegaskan penguatan layanan kesehatan tidak boleh berhenti pada satu titik pembangunan saja, melainkan harus berkelanjutan.

Zakaria juga membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait kebutuhan layanan kesehatan di masing-masing wilayah. Menurutnya, masukan warga menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas pembangunan fasilitas publik ke depan. Dengan beroperasinya Pustu Kalijaten, DPRD Sidoarjo berharap pelayanan kesehatan di Kecamatan Taman semakin merata dan mudah diakses. Meski masih dibutuhkan tambahan fasilitas untuk mencapai rasio ideal, langkah ini dinilai sebagai progres nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Ini bukan akhir, melainkan bagian dari proses panjang pemerataan layanan kesehatan. DPRD akan terus mendorong agar setiap warga Sidoarjo, di mana pun berada, mendapatkan akses kesehatan yang cepat, dekat, dan berkualitas,” pungkas Zakaria. (Adv)



Ketua DPRD Sidoarjo Hadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sidoarjo



@Lensa Global
Rabu, 25 Februari 2026, Februari 25, 2026 WIB



Komentar ()



SIDOARJO||LENSA-GLOBAL.com - Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo hadir rapat koordinasi terkait pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya pada sektor kuliner, sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang digelar Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo pada Rabu (25/2/2026) di ruang rapat kantor Disporapar Kabupaten Sidoarjo.

Acara ini selain dihadiri Ketua DPRD kabupaten Sidoarjo, juga hadir pula Ketua Komisi A DPRD kabupaten Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, Yudhi Iriyanto yang diwakili Rully beserta jajarannya serta perwakilan pelaku UMKM se-Kabupaten Sidoarjo.

Ketua DPRD kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di bidang kuliner perlu ditingkatkan menjelang tahun 2026 dengan fokus pada transformasi, keberlanjutan dan penguatan SDM. "Pemerintah Daerah harus menekankan pentingnya kolaborasi untuk menaikkan kelas pariwisata kuliner menjadikan salah satu penggerak utama mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo", tegasnya.

Menurut Abah Nasih-sapaan akrabnya- Kabupaten Sidoarjo harus bisa mengembangkan kuliner pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bimbingan teknis (Bimtek) kuliner tradisional yang bersih dan aman untuk meningkatkan standar kebersihan dan keamanan pangan, paparnya.

Masih menurut beliau, pengembangan kuliner pariwisata dan ekonomi kreatif juga dibutuhkan penguatan asosiasi jasaboga dan pelaku UMKM dalam ekosistem pariwisata untuk mendukung kuliner sebagai daya tarik wisata yang dapat menumbuhkan perekonomian daerah, ujar Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo ini.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, Yudhi Iriyanto yang diwakili Rully menambahkan bahwa sangat mendukung penuh terhadap upaya pengembangan pariwisata memperkuat sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dinilai penting untuk mendorong kuliner lokal sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata di Kabupaten Sidoarjo, urainya

Menurutnya, kuliner tidak hanya berfungsi sebagai produk konsumsi tetapi juga menjadi identitas budaya yang merepresentasikan ciri khas suatu daerah. Kabupaten Sidoarjo memiliki beragam kuliner tradisional yang telah dikenal luas dengan cita rasa khas dan berpotensi besar dikembangkan sebagai daya tarik wisata, pungkasnya.(nd/**)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Pimpin Forum Audensi Bersama Pedalindo, Ketua DPRD Sidoarjo Tegaskan Jangan Bunuh Rezeki Pedagang

RedSidoarjo © Februari 25, 2026



Liputan5news.com - Sidoarjo. Menjadi pimpinan dalam forum audensi bersama paguyuban Pedagang Kaki Lima Indonesia (Pedalindo), Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menegaskan agar pemerintah tidak sampai “membunuh rezeki” para pedagang usai relokasi dari kawasan CFD Alun-alun ke Mall Pelayanan Publik (MPP) selama Ramadan 2026.

Menurutnya, Ramadan memiliki magnet ekonomi yang besar, terutama bagi pelaku UMKM dan pedagang kaki lima yang mengandalkan momen berburu takjil dan buka puasa.

“Ramadan punya magnet luar biasa. Jangan sampai kita membunuh rezeki orang lain. UMKM adalah mitra pemerintah dan tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya saat memimpin forum audiensi bersama Paguyuban Pedagang Kaki Lima Indonesia (Pedalindo).

Founder sekaligus Ketua Umum Pedalindo, Junius Bram, mengatakan pihaknya menyampaikan aspirasi para pedagang yang terdampak relokasi. Ia menyebut, selama 11 tahun pedagang menempati Jalan Raya Ponti dan merasa mendapat dukungan dari Pemkab Sidoarjo.

Pada 23 Januari 2026 digelar rapat, dan kurang dari dua minggu kemudian pedagang dipindah dari Ponti ke Alun-alun. Per 1 Februari 2026, relokasi resmi dilakukan dengan total enam kelompok pedagang, di mana Pedalindo menjadi kelompok terbanyak.

Meski sempat euforia menempati Alun-alun, Bram mengakui pendapatan pedagang lebih tinggi saat berjualan di Ponti.

“Di Alun-alun yang ramai hanya makanan dan minuman. Pedagang pakaian turun drastis karena jam operasional terbatas,” katanya.

Pedalindo mencatat 3.700 data pedagang, terdiri dari sekitar 3.000 pedagang tidak tetap dan 700 pedagang tetap. Namun yang aktif berjualan sekitar 400 pedagang tetap selebihnya adalah pedagang sementara yang menempati lapak pedagang tetap yang izin tidak jualan.

“Saat dipindah ke Alun-alun kami mengajukan 505 pedagang namun ada yg tidak kebagian tempat. Selama ramadan ada kebijakan pindah ke MPP, kapasitas di MPP hanya mampu menampung 320 stan. Pada hari pertama, 430 pedagang datang, namun tidak semuanya bisa tertampung. Selain tempat tidak memadai, Bram juga menyebut sepihnya pengunjung, hanya satu hingga dua pedagang yang benar-benar laku di hari pertama,” tambahnya.

Pedalindo menegaskan tidak menolak relokasi, tetapi meminta dukungan promosi serta kepastian lokasi pasca-Lebaran. Mereka juga berharap selama sisa Ramadan yang tinggal sekitar tiga minggu, pedagang dapat kembali berjualan di Ponti.

Ketua DPD Pedalindo Sidoarjo, Sunyoto Gatot, menyampaikan empat tuntutan, yakni menolak relokasi ke MPP, meminta pengembalian ke Ponti, mendesak penerbitan Perbup UMKM sebagai payung hukum, serta pembentukan tim terpadu untuk menghentikan tarik-menarik kepentingan.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto menilai persoalan ini seharusnya sudah matang sebelum Ramadan.

“Pelaku usaha jangan dibuat mondar-mandir seperti ini. Harus ada perlindungan dan regulasi yang jelas,” tegasnya.

Anggota Komisi B Emir Firdaus menambahkan, UMKM perlu pembinaan, pelatihan, hingga akses pinjaman berbunga rendah sekitar 3 persen. Ia juga mengusulkan konsep festival UMKM di GOR sebagai alternatif lokasi yang lebih representatif tanpa mengganggu konsep CFD di Alun-alun.(Yanti)

Liputan Sidoarjo.com

Sekwan DPRD Sidoarjo Tegaskan Komitmen Fasilitasi Islah Pimpinan Daerah

February 25, 2026 - 52 Views



Progres Jatim.com, SIDOARJO – Dinamika politik di Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi perhatian publik. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Sidoarjo mendatangi Gedung DPRD, Rabu (25/2/2026), untuk menagih realisasi mediasi antara Bupati dan Wakil Bupati yang sebelumnya telah disepakati.

Namun di tengah tuntutan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo memastikan bahwa proses fasilitasi tidak berhenti. Sekretaris DPRD (Sekwan) Sidoarjo, Hari Suahyono, menegaskan pihaknya telah menyiapkan langkah konkret agar agenda mediasi segera terlaksana.

"Kami di sekretariat menjalankan fungsi administratif dan fasilitatif. Agenda pemanggilan sudah kami jadwalkan untuk besok. Koordinasi juga terus kami lakukan agar pertemuan berjalan sesuai harapan bersama," ujar Hari saat ditemui di sela-sela aktivitas di gedung dewan.

Kedatangan massa sebelumnya membawa tiga tuntutan utama kepada pimpinan legislatif. Mereka meminta DPRD menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati dalam satu forum resmi, menilai disharmonisasi berdampak pada kebijakan publik, serta mempertanyakan optimalisasi fungsi pengawasan dewan.

Meski demikian, Sekretariat DPRD menegaskan bahwa secara kelembagaan, komitmen untuk memediasi tetap berjalan. Dalam struktur pemerintahan daerah, sekretariat berperan memastikan seluruh agenda dewan terselenggara secara tertib, termasuk penjadwalan dan koordinasi lintas pihak.

Hari menjelaskan, proses mediasi bukan sekadar mempertemukan dua figur, melainkan memastikan forum berlangsung produktif dan sesuai tata tertib kelembagaan. Karena itu, pendekatan administratif dilakukan secara hati-hati dan terukur.

"Yang terpenting adalah memastikan forum berjalan efektif. Kami memahami harapan masyarakat agar pemerintahan berjalan harmonis dan pelayanan publik tetap optimal," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, hubungan kerja antara Bupati dan Wakil Bupati memang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Bagi sebagian kalangan masyarakat, soliditas pimpinan daerah sangat menentukan percepatan program pembangunan.

Namun di sisi lain, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki mekanisme internal yang harus ditempuh. Peran sekretariat di bawah komando Sekwan menjadi krusial untuk menjaga agar proses mediasi tidak melenceng dari koridor administratif dan peraturan yang berlaku.

Pengamat tata kelola pemerintahan daerah menilai, langkah cepat Sekretariat DPRD menjadwalkan ulang pertemuan merupakan sinyal positif bahwa aspirasi warga direspons secara institusional. Stabilitas komunikasi antar pimpinan daerah menjadi fondasi penting agar kebijakan strategis tidak terhambat.

Kini publik menanti realisasi agenda yang telah dijadwalkan. Jika pertemuan tersebut terlaksana sesuai rencana, maka DPRD melalui dukungan teknis sekretariat menunjukkan komitmennya sebagai fasilitator demokrasi lokal.

Di tengah dinamika politik yang mengemuka, langkah administratif yang terukur justru menjadi penentu. Sekretariat DPRD Sidoarjo memastikan bahwa aspirasi masyarakat tidak berhenti pada ruang audiensi, melainkan ditindaklanjuti dalam agenda resmi kelembagaan.

Bagi warga Sidoarjo, yang terpenting adalah pemerintahan berjalan efektif, pelayanan publik tetap prima, dan pembangunan tidak tersendat. Upaya mediasi yang kini difasilitasi DPRD melalui peran aktif Sekwan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga stabilitas tersebut. (GUS)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Wabup Sidoarjo Sidak Harga Sembako di Pasar Porong, Pastikan Stabil Jelang Lebaran



Foto : Wabup Sidoarjo sidak harga sembako.

- Temukan lebih banyak
- Layanan pijat refleksi

Langganan Berita Online

Jasa perbaikan rumah

Kapolres Magetan

Literasi Kesehatan

Berita Indonesia

Example
120x600

Republiknewscom.,Sidoarjo. 24 Februari 2026 – Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga kebutuhan pokok di Pasar Porong, Selasa (24/2/2026). Sidak tersebut dilakukan di sela kegiatan penyaluran bantuan kursi roda bagi masyarakat Kecamatan Porong.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga sembako sekaligus memantau langsung kondisi pasar pada hari keempat bulan Ramadan. Dalam kunjungannya, Wabup Mimik berinteraksi langsung dengan para pedagang guna mengetahui perkembangan harga bahan pokok di tingkat pasar.

Dari hasil pemantauan di lapangan, harga kebutuhan pokok terpantau relatif stabil. Meski terdapat kenaikan dan penurunan kecil pada beberapa komoditas, secara umum masih dalam batas wajar, meskipun permintaan masyarakat meningkat selama Ramadan.

“Alhamdulillah, sampai hari ini harga kebutuhan pokok masih stabil. Memang ada kenaikan dan penurunan kecil, tetapi masih dalam batas wajar. Insya Allah ketersediaan sembako juga cukup hingga Lebaran nanti,” ujar Mimik.

Selain memantau harga, Wabup juga menyerap aspirasi pedagang dan pengunjung pasar terkait kondisi sarana dan prasarana. Beberapa pengunjung mengeluhkan kondisi jalan di area pasar yang mulai bergelombang sehingga dinilai mengganggu kenyamanan dan keselamatan saat beraktivitas.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan segera berkoordinasi dengan pengelola pasar dan paguyuban pedagang untuk mencari solusi terbaik dalam meningkatkan kualitas fasilitas pasar.

“Kondisi Pasar Porong ini perlu perhatian bersama. Kami melihat masih banyak lapak yang kosong dan aktivitas pasar belum begitu ramai. Pemerintah harus hadir untuk mencari solusi agar pasar kembali hidup dan diminati masyarakat,” tegasnya.

Wabup Mimik juga menyoroti keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di luar area pasar yang dinilai turut memengaruhi aktivitas perdagangan di dalam pasar. Pemkab Sidoarjo akan mengkaji penataan kembali agar aktivitas jual beli dapat berjalan lebih tertata dan merata.

Melalui sidak ini, Pemkab Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, memastikan ketersediaan pangan, serta meningkatkan kualitas fasilitas pasar demi kenyamanan pedagang dan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026.



Atap Ruang Kelas SMPN 1 Gedangan Ambruk

Sidoarjo, Bhirawa

Karena faktor usia bangunan yang sudah tua, atap ruang kelas di SMPN 1 Gedangan ambruk. Bupati Sidoarjo Subandi mengintruksikan perbaikan harus segera dilakukan untuk menjamin keselamatan siswa.

"Kita menargetkan agar pengerjaan bisa langsung tancap gas. Harapannya, setelah libur Lebaran, siswa sudah bisa kembali belajar dengan tenang," komentar Bupati Sidoarjo Subandi, Selasa (24/2) kemarin, yang melakukan Sidak ke lokasi sekolahan tersebut.

Suabndi yang datang didampingi wakil ketua DPRD Warih Andono, Kadikbud Tirta Adi, Camat Gedangan Asmara Hadi dan Kades Punggul, menyaksikan kondisi satu ruang kelas yang atapnya telah jebol, sementara tiga ruang kelas lainnya

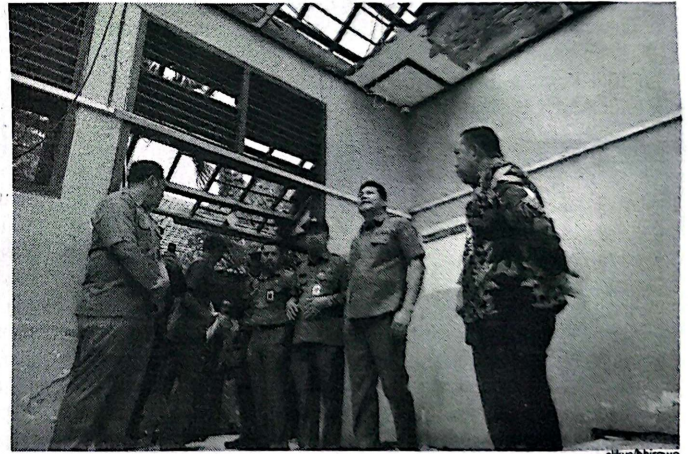
dalam kondisi lapuk dan rawan ambruk. Tidak hanya masalah atap, lantai ruang kelas juga kerap tergenang banjir saat hujan deras mengguyur.

Karena kondisi yang memprihatinkan, Pemkab Sidoarjo menurut Subandi akan mempercepat proses perbaikan ruang kelas tersebut, melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT). Agar proses perbaikan tidak perlu menunggu penganggaran reguler yang memakan waktu lama. "Perbaikan harus segera dilakukan demi menjamin keselamatan siswa," katanya kembali.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono, ikut menambahkan kerusakan mendesak yang harus ditangani adalah pembangunan kembali atap yang ambruk serta penggantian konstruksi kayu yang sudah keropos dengan material yang lebih kokoh.

Kepala Dikbud Sidoarjo Tirta Adi, dalam kesempatan itu memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk renovasi ruang kelas tersebut adalah sekitar Rp 250 juta

per ruang kelas. "Namun, angka final masih menunggu kajian teknis, termasuk opsi penggunaan rangka baja ringan agar lebih awet," komentarnya. [kus.wwn]



Ruang kelas di SMPN 1 Gedangan yang berada di desa Punggul Kecamatan Gedangan ambruk. Disidak oleh Bupati, Wakil Ketua DPRD, Kadikbud, Camat Gedangan dan Kades Punggul.

MITRA

Tantangan Menghidupkan Pasar Heritage Buduran

BARU dipindah dari Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, belum lama ini, Setya Handoko, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kabupaten Sidoarjo, merasa tertantang untuk menghidupkan pasar Buduran yang dievaluasi kurang diminati pembeli untuk berbelanja.

Menurut pejabat eselon III b Pemkab Sidoarjo ini, Pasar Buduran, notebene bangunannya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Sehingga menurutnya, pasar Bu-



Setya Handoko ST

▶▶ ke halaman 11

Tantangan Menghidupkan Pasar Heritage Buduran

● Sambungan hal 1

duran, menjadi salah satu pasar tradisional yang termasuk heritage di Kabupaten Sidoarjo.

Disperindag Sidoarjo, menurut Handoko, sejatinya telah berupaya menghidupkan kembali pasar tradisional tersebut. Renovasi sempat dilakukan dengan sentuhan grafiti, penataan ala pujasera, hingga pengisian stan makanan dan minuman.

Pasar yang sempat mati suri itu, sempat tampak lebih segar dan menarik. Cara itu cukup menarik minat sejumlah pedagang. Aktivitas pasar sempat menggeliat lagi. Tapi, sayang tidak bertahan lama.

“Minat konsumen berbelanja di pasar ini terbilang rendah. Akibatnya banyak stan kosong. Akhirnya sebagian pedagang memilih

angkat kaki,” komentarnya.

Momen Bulan Suci Ramadhan, dianggap Hondoko, semoga bisa sebagai langkah awal yang berkah, untuk menghidupkan kembali pasar tersebut. Disperindag Sidoarjo, belum lama ini, membuka grand opening pasar Ramadan di pasar Buduran.

Acara itu kolaborasi antara DPD IKAPPI Sidoarjo dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo. Handoko merasa masih punya ada harapan untuk bisa menghidupkan keberadaan pasar Buduran.

“Harus ada niat baik, terus semangat, serta ada usaha, semoga semuanya bisa menghidupkan lagi aktivitas ekonomi di pasar Buduran ini, semoga semua masyarakat merespon positif, niat baik Pemkab Sidoarjo ini,” komentarnya. [kus.gat]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Wabup Mimik Idayana

Serahkan Kursi Roda Warga Keterbatasan Fisik di Porong

SIDOARJO - Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana bersama Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyalurkan bantuan kursi roda kepada warga penerima manfaat di Kecamatan Porong, Selasa sore (24/2/26).

Bantuan diberikan kepada Ribowo dan Manis, warga Desa Pamotan, serta Seger, warga Desa Candi, Kecamatan Porong. Penyaluran tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan dukungan alat bantu mobilitas bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan, Wakil Bupati Sidoarjo menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang mengalami keterbatasan fisik dan kesulitan ekonomi.

"Ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kesulitan mendapatkan alat bantu kursi



Wabup Sidoarjo Mimik Idayana menyerahkan bantuan kursi di Kecamatan Porong, Selasa sore (24/2/26).

roda," ujar Mimik Idayana.

Ia menegaskan, bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian serta memudahkan aktivitas sehari-hari para penerima manfaat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Sosial juga akan terus melakukan pendataan dan pemantauan agar bantuan sosial tepat sasaran," tegasnya.

Salah satu penerima manfaat, Manis, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Ia mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan kursi roda tersebut.

"Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Hj. Mimik Idayana atas bantuan kursi roda ini. Semoga dapat membantu aktivitas saya sehari-hari," ungkapnya haru.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat terus terjalin guna mewujudkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. ● Loe

DUTA

Bupati : Perbaiki Cepat Lewat Skema BTT

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo, Subandi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 1 Gedangan, Selasa (24/2/26), menyusul laporan ambruknya atap salah satu ruang kelas.

Dalam sidak tersebut, Subandi menegaskan perbaikan harus segera dilakukan demi menjamin keselamatan siswa dan kelancaran proses belajar-mengajar.

Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Satu ruang kelas terlihat dengan atap jebol, sementara tiga ruang kelas lainnya mengalami pelapukan cukup parah dan dinilai rawan ambruk. Selain itu, lantai kelas kerap tergenang banjir saat hujan deras, sehingga berpotensi mengganggu aktivitas belajar dan membahayakan siswa maupun guru.

"Ini tidak bisa ditunda. Anak-anak membutuhkan sekolah yang aman dan layak. Itu tanggung jawab pemerintah daerah," tegas Subandi

Selasa sore.

Sidak tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, perwakilan Dinas Pendidikan, camat setempat, serta kepala desa.

Untuk mempercepat penanganan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memastikan perbaikan dilakukan melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT). Skema ini dipilih agar proses pengerjaan tidak menunggu perubahan anggaran reguler yang biasanya memerlukan waktu lebih panjang.

Subandi menjelaskan, pekerjaan mendesak meliputi pembangunan ulang atap yang ambruk serta penggantian konstruksi kayu yang telah keropos dengan material yang lebih kuat dan tahan lama.

"Atap harus dibangun ulang, dan lantainya kita tinggikan sekalian karena sering banjir. Jadi tidak kerja dua kali," ujarnya.

Berdasarkan estimasi awal, kebutuhan anggaran diperkirakan



Bupati Sidoarjo Subandi sidak SMPN 1 Gedangan yang ambruk

sekitar Rp250 juta per ruang kelas. Namun angka tersebut masih akan difinalisasi setelah kajian teknis rampung, termasuk mempertimbangkan penggunaan rangka baja

ringan agar bangunan lebih kokoh dan aman.

Pemkab menargetkan kajian teknis segera selesai agar proses perbaikan bisa langsung dilak-

sanakan. Diharapkan, selepas libur Lebaran, para siswa sudah dapat kembali belajar dengan tenang di ruang kelas yang aman dan nyaman. ● Loe

DUTA



Bupati Subandi didampingi Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono sidak ke SMPN 1 Gedangan, Selasa (24/2).

Perbaiki SMPN 1 Gedangan Pakai Dana BTT

Sidoarjo - HARIAN BANGSA
Pemkab Sidoarjo bakal memanfaatkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk memperbaiki gedung SMPN 1 Gedangan, yang atap kelasnya ambrol.

Hal itu terungkap saat Bupati Sidoarjo Subandi didampingi Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono melakukan sidak ke SMPN 1 Gedangan, Selasa (24/2). "Melihat kondisi seperti

ini, tentu harus segera diperbaiki. Anak-anak butuh sekolah yang aman, dan itu tanggung jawab pemerintah daerah," tegas Subandi.

Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi satu ruang kelas yang atapnya telah jebol, sementara tiga ruang kelas lainnya dalam kondisi lapuk dan rawan ambruk.

Tak hanya masalah atap, lantai ruang kelas juga kerap tergenang banjir saat hujan deras mengguyur.

Melihat kondisi yang mem-

prihatinkan, Pemkab Sidoarjo akan mempercepat proses perbaikan melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT).

Hal ini dilakukan agar pengerjaan tidak perlu menunggu proses penganggaran reguler yang memakan waktu lama.

Berdasarkan perkiraan awal, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 250 juta per ruang kelas. Namun, angka final masih menunggu kajian teknis, termasuk opsi penggunaan rangka baja ringan agar lebih awet. (sta/rus)

PLM Peduli Yatim Piatu dan Duafa

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Di tengah maraknya kegiatan sosial muslim selama Ramadan, Pemerhati Lingkungan Magersari (PLM) memilih langkah berbeda. Komunitas ini menempatkan kredibilitas dan ketepatan sasaran sebagai prioritas utama sebelum menyalurkan kepedulian kepada anak yatim piatu dan dhuafa.

Sejak 2019, PLM rutin menggelar buka bersama dengan anak-anak asuh yang berada di bawah naungan Yayasan Nusantara Bhakti Wira Nagara, yang berlokasi di Jalan Guntur 1 No 7 RT 10 RW 2 Dusun Suruh, Sukodono, Sidoarjo. Tahun ini, kegiatan yang bertajuk “PLM Berbagi” berlangsung di Steak Moen-Moen, Jalan Ponti, Sidoarjo, Rabu (25/02/2026), dengan dihadiri 50 undangan dari unsur yayasan, kolega, serta warga Magersari yang berstatus yatim piatu.

Pembina PLM, Slamet Basuki, mengungkapkan bahwa sebelum menjatuhkan pilihan kepada yayasan tersebut, pihaknya melakukan survei ke beberapa panti asuhan di wilayah Sidoarjo. Langkah itu dilakukan agar bantuan dan kebersamaan yang dibangun benar-benar diterima oleh anak-anak yang memang tinggal dan dibina secara berkelanjutan.

“Sudah survei ke beberapa panti asuhan dan anak yatim piatu, sebagian besar hanya oknum. Tidak tinggal di panti asuhan, namun ketika ada kunjungan baru anak-anak muncul,” ujarnya.

Setelah memastikan legalitas dan kredibilitas pengelolaan, PLM akhirnya memutuskan bermitra dengan yayasan yang telah berdiri selama 16 tahun tersebut. Bagi PLM, keberlanjutan pembinaan menjadi faktor penting dalam menentukan sasaran kegiatan sosial.

Slamet juga menegaskan, kegiatan tahunan ini murni berasal dari hasil urunan para anggota. Tidak ada dukungan dari sponsor besar maupun donatur konglomerat. (cat/rus)



PLM bersama yatim piatu dan duafa, kemarin.



Wabup Sidoarjo Sidak Harga Sembako dan Serap Aspirasi Pedagang di Pasar Porong

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga kebutuhan pokok di Pasar Porong, Selasa (24/2/2026), di sela kegiatan penyaluran bantuan kursi roda bagi masyarakat Kecamatan Porong. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan stabilitas harga sembako serta memantau secara langsung kondisi pasar pada hari keempat bulan Ramadan.

Dalam sidak tersebut, Wabup Mimik berinteraksi langsung dengan para pedagang untuk mengetahui perkembangan harga kebutuhan pokok di tingkat pasar. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, harga sembako terpantau relatif stabil dan belum mengalami kenaikan signifikan meskipun terjadi peningkatan permintaan selama Ramadan.

"Alhamdulillah, sampai hari ini harga kebutuhan pokok masih stabil. Memang ada kenaikan dan penurunan kecil, tetapi masih dalam batas wajar. Insya Allah ketersediaan sembako juga cukup hingga Lebaran nanti," ujar Wabup Mimik.

Selain memantau harga, Wabup Mimik juga menyerap aspirasi dari pedagang dan pengunjung pasar terkait kondisi sarana dan prasarana. Sejumlah pengunjung mengeluhkan kondisi jalan di area pasar yang mulai bergelombang dan dinilai dapat mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengunjung saat beraktivitas.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan segera berkoordinasi dengan pengelola pasar dan paguyuban pedagang guna mencari solusi terbaik dalam meningkatkan kualitas fasilitas pasar.

"Kondisi Pasar Porong ini perlu perhatian bersama. Kami melihat masih banyak lapak yang kosong dan aktivitas pasar belum begitu ramai. Pemerintah harus hadir untuk mencari solusi agar pasar kembali hidup dan diminati masyarakat," tegasnya.

Wabup Mimik juga menyoroti keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di luar area pasar yang dinilai turut memengaruhi aktivitas perdagangan di dalam pasar. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan mengkaji penataan kembali agar aktivitas jual beli dapat berjalan lebih tertata dan merata.

Melalui kegiatan sidak ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, katanya. (Khol/ Dy)



KESEHATAN: Gedung RSUD Sidoarjo Barat.

RSUD Sidoarjo Barat Gelar Kegiatan Keagamaan selama Ramadan

DI tengah suasana khidmat Ramadan 1447 Hijriah, RSUD Sidoarjo Barat memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Rumah sakit milik Pemkab Sidoarjo itu hanya melakukan penyesuaian jam layanan poliklinik, sementara Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap siaga 24 jam.

Direktur RSUD Sidoarjo Barat, dr Abdillah Segaf Alhadad menegaskan bahwa komitmen pelayanan prima tetap menjadi prioritas utama selama bulan suci.

"Pelayanan masih tetap seperti hari sebelum bulan Ramadan, cuma ada sedikit perubahan jam pelayanan," ujarnya, Rabu (25/2).

Adapun jadwal pendaftaran pasien poliklinik selama Ramadan 1447 H yakni Senin-Kamis pukul 07.30-11.30, Jumat pukul 07.30-10.00, dan Sabtu pukul 07.30-10.30. Sementara itu, layanan IGD tetap buka 24 jam tanpa perubahan.

Tak hanya fokus pada pelayanan medis, RSUD Sidoarjo Barat juga menggelar berbagai kegiatan keagamaan untuk menyemarakkan Ramadan. Di antaranya salat dhuhur berjamaah, istighosah setiap Kamis, serta pengajian rutin yang menghadirkan ustad setiap pekan.

Jalan Rusak Sukodono-Ponokawan Diperbaiki Pakai Overlay tapi Tak Penuh

Setelah lama dikeluhkan karena berlubang dan kerap tergenang, ruas Jalan Bangsri, Sukodono-Ponokawan akhirnya diperbaiki. Namun, perbaikan dilakukan dengan metode overlay tidak penuh lantaran keterbatasan anggaran Dinas PU.

Diky Putra Sansir,
Wartawan Radar Sidoarjo

SAAT sidak, Selasa (24/2), Bupati Sidoarjo Subandi mendapati proses perbaikan tengah berlangsung. Sejumlah pekerja tampak menambal dan melapisi titik-titik kerusakan menggunakan hotmix.

"Kita hari ini mengerjakan daerah wilayah Sukodono ya. Ini Dungus sampai arah ke Krian, kurang lebih empat sampai lima kilometer perbaikan kita," ujar Subandi di lokasi.

Ia menjelaskan, secara ideal perbaikan dilakukan dengan overlay penuh minimal setebal tiga sentimeter di seluruh badan jalan. Namun kondisi anggaran membuat pengerjaan harus disesuaikan. "Nah, karena ini kita juga terbatas dengan

FENOMENA



BUTUH PERHATIAN: Bupati Sidoarjo Subandi (dua dari kanan) saat sidak jalan rusak di ruas Sukodono-Ponokawan.

• Ke Halaman 10

BHS Soroti Aspal Perlintasan KA Sebidang Tak Rata

TANGGULANGIN-Keselamatan di perlintasan sebidang kereta api tak hanya soal palang pintu yang tertutup, tetapi juga kondisi aspal yang

rata dan aman dilalui. Jika permukaan jalan berlubang atau tidak sejajar dengan rel, risikonya bukan sekadar kemacetan, melainkan kecelakaan fatal.

Hal itu ditegaskan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), saat meninjau Perlintasan Sebidang KA di Jalan Raya Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Rabu (25/2).

● Ke Halaman 10



TEGAS: BHS (tengah) saat berkoordinasi untuk memastikan aspal di perlintasan sebidang, Tanggulangin, Sidoarjo, Rabu (25/2).

RUDIANTO/RADAR SIDOARJO

Komisi XIII DPR RI Tinjau Langsung Pelayanan Kunjungan dan Pembinaan di Lapas